

SUBSIDI LISTRIK

DARI TAHUN KE TAHUN

2025

Rp 87.72 triliun

2024

Rp 77 triliun

2023

Rp 68 triliun

2022

Rp 59 triliun

2021

Rp 50 triliun

2020

Rp 48 triliun

Sumber :
Berbagai Sumber
Diolah

MEMBUNCIT, ANGGARAN SUBSIDI LISTRIK CAPAI RP 90,32 TRILIUN DI 2025 ?

Subsidi listrik yang diberikan pemerintah kerap kali dinantikan masyarakat khususnya masyarakat bawah. Sebab, adanya subsidi listrik tentunya sangat membantu dan meringankan beban biaya hidup mereka. Misalnya pada rakyat miskin dan rentan yang listrik mereka 450 VA dan 900 VA, dengan adanya subsidi maka pendapatan mereka bisa digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya. Subsidi listrik juga bisa mendorong produktivitas ekonomi kecil, mulai dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), petani, nelayan, dan usaha rumahan. Tak hanya itu, subsidi listrik juga memungkinkan pemerintah memperluas jaringan listrik ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), di mana biaya penyediaan listrik biasanya lebih tinggi dari tarif jual. Akan tetapi, subsidi listrik dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan dan membutuhkan biaya besar dari APBN, yang dapat membebani keuangan negara dan mengurangi ruang fiskal untuk sektor lain. Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah subsidi listrik terus mengalami kenaikan dan makin membuncit. Di tahun 2020 subsidi listrik mencapai Rp 48 triliun, kemudian pada tahun 2021 naik lagi menjadi Rp 50 triliun. Kemudian pada 2022 menjadi Rp 59 triliun, pada 2023 mencapai Rp 68 triliun lebih, sedangkan pada 2024 mencapai Rp 77 triliun. Bahkan, anggaran subsidi listrik akan membuncit di tahun 2025 ini. Dari anggaran subsidi listrik Rp 87,72 triliun, diperkirakan bisa melonjak hingga sebesar Rp 90,32 triliun.

TARIF LISTRIK DI SELURUH INDONESIA PER 1 JULI 2025

Tarif listrik keperluan rumah tangga:

- Golongan R-1/TR kecil daya 900 VA-RTM: Rp 1.352 per kWh
- Golongan R-1/TR kecil daya 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
- Golongan R-1/TR kecil daya 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
- Golongan R-2/TR menengah daya 3.500-5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan R-3/TR, TM besar daya di atas 6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh.

Tarif listrik keperluan bisnis:

- Golongan B-2/TR kecil daya 6.600 VA-200 kVA: Rp 1.444,70 per kWh
- Golongan B-3/TM, TT menengah daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh.

Tarif listrik keperluan industri:

- Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh
- Golongan I-4/TT daya di atas 30.000 kVA: Rp 996,74 per kWh.

Tarif listrik subsidi rumah tangga:

- Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp 415 per kWh
- Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp 605 per kWh.

Tarif listrik keperluan pelayanan sosial:

- Golongan S-1/TR daya 450 VA: Rp 325 per kWh
- Golongan S-1/TR daya 900 VA: Rp 455 per kWh
- Golongan S-1/TR daya 1.300 VA: Rp 708 per kWh
- Golongan S-1/TR daya 2.200 VA: Rp 760 per kWh
- Golongan S-1/TR daya 3.500 VA-200 kVA: Rp 900 per kWh
- Golongan S-2/TM daya lebih dari 200 kVA: Rp 925 per kWh.

Tarif listrik keperluan fasilitas pemerintah

- Golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan P-2/TM tegangan menengah daya di atas 200 kVA: Rp 1.522,88 per kWh
- Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum: Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan L/TR, TM, TT daya pada berbagai tegangan: Rp 1.644,52 per kWh.



DEREGULASI PERMUDAH IMPOR 10 KOMODITAS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) Indonesia telah melorot, demikian juga peringkat daya saing yang telah turun peringkat. Terakhir kali Bank Dunia menerbitkan kajian pemeringkatannya pada 2019 silam. Kala itu, peringkat indeks EoDB Indonesia turun dari posisi 72 ke 73 dari 190 negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) Indonesia telah melorot, demikian juga peringkat daya saing yang telah turun peringkat. Terakhir kali Bank Dunia menerbitkan kajian pemeringkatannya pada 2019 silam. Kala itu, peringkat indeks EoDB Indonesia turun dari posisi 72 ke 73 dari 190 negara.

Sementara itu, untuk peringkat daya saing diterbitkan oleh Institute of Management Development (IMD). Teranyar, dalam World Competitiveness Ranking (WCR) 2025, IMD menetapkan peringkat daya saing Indonesia turun 13 peringkat menjadi peringkat 40 dari total 69 negara.

"Sehingga Ease of Doing Business jadi pertimbangan dan salah satu review Indonesia mendapatkan review yang lebih rendah. Oleh karena itu deregulasi menjadi sebuah keharusan yang diminta Pak Presiden agar kita kompetitif, karena persaingan makin kuat antar negara di tengah ketidakpastian," kata Airlangga di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Untuk mendongkrak peringkat EoDB tersebut pemerintah melakukan deregulasi impor untuk 482 barang dari 10 komoditas. Airlangga

mengatakan kebijakan deregulasi ini juga sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah besarnya ketidakpastian aktivitas perdagangan dunia.

"Hari ini Bapak Presiden meminta supaya memperkuat kondisi perekonomian dalam negeri dan sekaligus juga untuk memperkuat kondisi regional dengan beberapa negara ASEAN," ucap Airlangga.

Airlangga menjelaskan, paket kebijakan deregulasi tersebut pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sekaligus untuk mendorong daya saing. Lalu, menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk.

Selanjutnya, bertujuan untuk mendorong sektor padat karya supaya izin usahanya bisa menarik terhadap investasi dan menjaga investasi yang ada. Selain itu, kebijakan ini juga dalam rangka menjaga tren pertumbuhan ekonomi nasional.

"Salah satu yang diregulasi adalah Revisi Permendag Nomor 36 tahun 2023, Juncto Permendag Nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan pengaturan import," tutur Airlangga.

Kebijakan deregulasi ini ia katakan beriringan dengan akan terbitnya Keputusan Presiden tentang Satgas Perlindungan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Hubungan Indonesia-AS, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja, hingga kelanjutan kebijakan deregulasi untuk percepatan kemudahan perizinan berusaha maupun peningkatan iklim investasi dan perizinan berusaha.

Airlangga mengatakan, melalui kebijakan deregulasi ini setidaknya ada 10 komoditas yang aturannya direlaksasi. "Jadi ini terkait perubahan lartas yang mencakup relaksasi terhadap 10 komoditas," tutur Airlangga.

Selain masalah itu, Airlangga berujar paket kebijakan deregulasi yang nantinya merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 itu juga mengakomodir kepentingan Indonesia untuk bergabung dengan OECD serta sebagai bagian dari langkah untuk menyesuaikan kebijakan dalam kesepakatan Indonesia-European Union

Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) beserta CEPA lainnya.

Termasuk dalam rangka mengakomodir kepentingan negosiasi tarif dagang dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang batas akhir negosiasinya pada 8-9 Juli 2025.

"Jadi seluruhnya selaras sehingga momentum ini dilakukan untuk kebijakan deregulasi, tapi kebijakan deregulasi ini baru paket pertama dan akan ada hal-hal lain yang dilakukan," paparnya.

Adanya deregulasi ini, lanjut Airlangga, tidak akan mempengaruhi penerimaan negara. Ia menjelaskan bahwa deregulasi bertujuan untuk menyederhanakan masalah perizinan terhadap 482 jenis barang dari 10 komoditas yang masuk dalam fokus utama. Sementara terkait dengan tarif bea masuk, masih menggunakan aturan lama.

"Terkait dengan penerimaan negara, ini kebanyakan kita tangani masalah birokrasi perizinannya. Kita tidak mengumumkan perubahan tarif bea masuk, jadi tidak ada akibat kepada penerimaan negara," kata Airlangga.

Deregulasi kebijakan impor merupakan tahap pertama sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyikapi persaingan perdagangan di tingkat global. Deregulasi ini juga sejalan dengan perundingan bersama Amerika Serikat dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).

"Jadi seluruhnya itu selaras. Oleh karena itu, momentum ini dilakukan untuk melakukan kebijakan deregulasi, tetapi deregulasi ini baru paket pertama. Jadi masih ada beberapa hal lain yang kita akan lakukan," ujarnya.

Kebijakan deregulasi ini, merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2025 terkait dengan kebijakan dan pengaturan impor, yang nantinya akan diterbitkan menjadi Permendag 16 Tahun 2025.

Adapun 10 komoditas yang masuk dalam fokus utama, yakni produk



BERIKUT INI DAFTAR 10 KOMODITAS YANG TELAH DITETAPKAN UNTUK DEREGULASI:

1. Produk Kehutanan untuk 441 jumlah kode HS
2. Pupuk bersubsidi untuk 7 jumlah kode HS
3. Bahan Baku Plastik untuk 1 jumlah kode H
4. Sakarin, Silamat, Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol untuk 2 jumlah kode HS
5. Bahan bakar Lain dengan jumlah 9 kode HS
6. Bahan Kimia Tertentu dengan jumlah 2 kode HS
7. Mutiara dengan jumlah 4 kode HS
8. Food Tray dengan jumlah 2 kode HS
9. Alas Kaki dengan jumlah 6 kode HS
10. Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga dengan jumlah 4 kode HS

kehutanan (441 HS/kode jenis barang); pupuk bersubsidi (7 HS); bahan baku plastik (1 HS); bahan bakar lain (9 HS); sakarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol (6 HS); bahan kimia tertentu (2 HS); mutiara (4 HS); food tray (2 HS); alas kaki (6 HS); serta sepeda roda dua dan rodadua (4 HS).

Sementara itu, Kementerian Keuangan mendukung penuh deregulasi impor yang baru saja ditetapkan pemerintah terhadap 10 jenis barang komoditas. Penetapan kebijakan ini dituangkan dalam Permendag No. 16 Tahun 2025. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti dengan pengawasan impor bagi barang yang lebih cepat dan mengintegrasikannya dengan sistem CEISA.

"Pertama, kami ingin memastikan prosesnya itu berlangsung dengan cepat, satu adalah relaksasi lartas ini. Ada 482 HS, teman-teman Bea Cukai sudah mengidentifikasi hal ini," kata Anggito.

Selain itu, Bea Cukai telah menetapkan tarif remedi dipercepat dari menjadi 14 hari dari 40 hari. Adapun, tarif remedi bea cukai adalah biaya yang dikenakan pada barang impor yang melebihi batas pembebasan bea masuk. Tarif ini bervariasi tergantung pada jenis barang dan nilai pabeannya. Dia menuturkan Bea Cukai akan memastikan kelancaran proses bisnis dan bongkar di pelabuhan. Hal ini dilakukan guna menghindari ekonomi biaya tinggi. (rls/ant/ist/lut)

DPR : SELESAIKAN PERSOALAN

17.655 LAHAN TRANSMIGASI YANG TUMPANG TINDIH !

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan yang hingga saat ini masih bermasalah. Bahkan, untuk upaya percepatan penyelesaian masalah ini diperlukan instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.



Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu saat rapat dengan Menteri Transmigrasi di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Presiden dalam hal ini menurut saya yang lebih gampang untuk memberi keputusan agar terjadi pemutihan terhadap kawasan hutan. Diperuntukkan yang sudah diduduki oleh warga transmigrasi menjadi hak milik mereka," kata Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Boyman Harun.

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mengatakan sebenarnya tidak memperlakukan keputusan pemerintah untuk melepas ribuan bidang status area hutan untuk para transmigran. Hanya saja, upaya tersebut perlu dilakukan secara cermat.

Menurutnya, persoalan Transmigrasi itu cukup kompleks. Di mana para transmigran mendapatkan surat lahan yang masuk status area hutan, padahal di sisi lain aturannya sudah jelas bahwa hal ini tidak diperbolehkan.

"Hak atas kepemilikan tanahnya harus jelas, apabila tidak ada maka mereka masuk kawasan hutan. Padahal jelas dalam aturan apabila masuk kawasan hutan dapat dipastikan penjahat karena tanah yang dimilikinya tidak berdasar," imbuhnya.

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan 17.655 bidang lahan transmigrasi itu dinilai belum clean and clear lantaran beririsan dengan wilayah kawasan hutan. "Total beban penerbitan SHM transmigrasi saat ini mencapai 129,553 bidang. Dari jumlah tersebut, 17.655 atau 13,6% berada di dalam kawasan hutan," kata Iftitah dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

"Isu ini sangat penting karena tumpang tindih kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan masih kerap terjadi, yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak transmigran atas tanah," ujar Iftitah dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI tersebut.

Untuk diketahui bahwa Pulau Sumatera menjadi wilayah dengan HPL transmigrasi terbesar, mencapai 1,2 juta hektar atau 38,07 persen dari total. Sedangkan wilayah HPL terkecil ada di Maluku yakni 49 ribu hektar atau 1,6 persen. Dan total HPL tersebut, belum semuanya bersertifikat.

Berdasarkan pemetaan hingga Juni 2025, provinsi dengan jumlah bidang transmigrasi terbanyak yang tumpang tindih dengan kawasan hutan adalah Maluku Utara (3.498 bidang), Jambi (1.305 bidang), Lampung (1.300 bidang), Sulawesi Tenggara (1.113 bidang), dan Maluku (1.048 bidang).

Terkait masalah tumpang tindih ini, Menurut Iftitah, membagi menjadi dua tipologi. Pertama, lokasi transmigrasi yang sudah memiliki izin prinsip pelepasan kawasan hutan. Kedua, lokasi yang belum memiliki izin tersebut.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar persoalan ini terjadi pada era 1990-an hingga tahun 2022. Namun, ada juga kasus yang terjadi sejak 1968, seperti di Kampung Trans Tanjung, Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai contoh, Iftitah menyebut kasus di kawasan transmigrasi Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

"Penempatan transmigran dilakukan pada tahun 1998-1999, tetapi pada tahun 2019 terbit SK Menteri Kehutanan yang menyatakan 94 bidang berada dalam kawasan hutan dan 95 bidang lainnya di zona penyangga. Sekitar 400 kepala keluarga kesulitan memperoleh SHM," ungkapnya.

Pemerintah telah berupaya menyelesaikan persoalan ini sejak integrasi program transmigrasi ke dalam Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2004.

Kemudian, pada 2007 telah dibentuk tim lintas sektor yang berhasil mengurangi jumlah lokasi transmigrasi dalam kawasan hutan dari 436 menjadi 87 lokasi pada 2018.

Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan, pengembalian izin prinsip, serta program Objek Reforma Agraria (TORA).

Saat ini, Kementerian Transmigrasi mengusung program Tuntas Lahan, Tuntas Harapan atau TransTuntas, yang menargetkan kepastian hukum tanah transmigrasi sebagai fondasi pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi.

"Fokus utama kami adalah kepastian hukum atas tanah dan lahan transmigrasi, tersedianya data pertanahan yang valid dan mutakhir, serta penyelesaian masalah agraria secara menyeluruh," kata Iftitah.

Di satu sisi, untuk mengurus SHM transmigrasi ini, Kementrans mengalokasikan Rp62,5 miliar yang masuk dalam Program Trans Tuntas (T2). "Tahun ini kami sudah alokasikan dana untuk program Trans Tuntas penyelesaian (hak milik) lahan transmigrasi melalui ABT (Anggaran Biaya Tambahan) tahun 2025 sebesar Rp62,5 miliar," kata Iftitah.

Ia menyampaikan selain permasalahan tumpang tindih kawasan dengan area hutan, masalah lahan juga karena adanya sengketa Hak Guna Usaha (HGU) dengan para pelaku usaha dan perkebunan, serta konflik lahan dengan masyarakat setempat.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, dana yang telah dialokasikan akan digunakan untuk inventarisasi HPL Transmigrasi, percepatan penerbitan HPL Transmigrasi, percepatan penerbitan SHM Transmigrasi, dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

Iftitah mengatakan penggunaan dana tersebut juga termasuk pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, serta dana pemasangan patok blok terbangun. "Dalam waktu dekat, kami juga akan menggunakan dana tersebut untuk menyelesaikan persoalan lahan di Natuna," ujarnya.

Ia menuturkan pihaknya diwajibkan untuk membayar biaya administrasi atau provisi sekitar Rp3 miliar kepada Kementerian Kehutanan untuk mengurus hak atas lahan transmigrasi di Natuna, Kepulauan Riau.

"Kami pada bulan Desember lalu sudah mencoba untuk menegosiasi, (tapi) dari Kementerian Kehutanan tetap dimintakan untuk dibayarkan. Karena kami belum ada dananya, sebentar lagi Insyaallah ABT cair, itu kami alokasikan (untuk provisi lahan di Natuna) ke anggaran tersebut," ucap Iftitah. (ant/ist/lut)

Gaduh Siswa Titipan saat SPMB WAMENDIKDASMEN: TAK ADA JALUR REKOMENDASI

Viral memo titip siswa dalam seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon, Banten oleh Wakil Ketua (Waka) DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo. Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq menegaskan SPMB tidak ada jalur rekomendasi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan jalur Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB) sudah ditentukan. Tidak ada jalur rekomendasi di situ.

"Jalurnya hanya 4, domisili, afirmasi, prestasi, dan lokasi. Tidak ada jalur rekomendasi," kata Fajar di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan pada Senin (30/6/2025).

Belakangan memang tengah ramai surat Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo mengirim memo menitip siswa ke sebuah SMA di Cilegon, Banten, pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Fajar sudah mendengar kabar itu.

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di sejumlah daerah. Foto: Dok. Kemendikdasmen

"Saya mengikuti pemberitaan tersebut, kan beliau juga sudah minta maaf ya. Jadi secara umum kalau kita lihat evaluasi, per hari ini itu tidak ada masalah yang serius sebenarnya," ujar Fajar.

"Memang ada informasi rumor bahwa ini ada titipan jual beli kursi, itu sudah kami cek. Mungkin rumor itu berkembang sebagai tanda pengingat supaya orang lebih aware, lebih waspada tidak melakukan tindakan itu," tutur dia.

Fajar menilai, secara keseluruhan, penyelenggaraan SPMB tidak ada masalah. Proses seleksi berjalan lancar.

"Dan saya sudah ngecek ke beberapa daerah, alhamdulillah sih tidak ada kendala yang berarti dan banyak sekolah yang sudah selesai mengumumkan SPMB-nya tinggal masalah daftar ulang," tambahnya.

Waka DPRD Banten Minta Maaf

Dalam foto yang viral, terlihat selembar surat dengan kop DPRD Banten bertuliskan "Perihal: Mohon dibantu dan ditindaklanjuti" serta dibubuhi tanda tangan atas nama Dr. H. Budi Prajogo, SE., M.Ak.

Tak hanya itu, surat tersebut juga disertai kartu nama yang menampilkan foto Budi lengkap dengan logo DPRD dan lambang partai yang menaunginya.

Isi memo yang seolah-olah menunjukkan adanya permintaan khusus terhadap sekolah negeri menjadi pemicu reaksi dari banyak kalangan, terutama para orang tua dan siswa yang mengikuti proses seleksi secara reguler.

Menanggapi viralnya dokumen tersebut, Budi Prajogo akhirnya memberikan klarifikasi kepada publik.



Tangkapan layar memo berisi penitipan siswa baru saat SPMB salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon, Banten, yang ditandatangani Budi Prajogo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten.(ist)

Ia mengakui bahwa surat itu memang berasal darinya dan ditandatangani berdasarkan permintaan stafnya di lingkungan DPRD.

Staf tersebut disebut membawa aspirasi dari seorang warga yang anaknya ingin melanjutkan pendidikan di SMA Negeri namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Budi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara langsung menghubungi pihak sekolah atau melakukan bentuk intervensi lain dalam proses seleksi.

Ia menyatakan bahwa surat

tersebut hanya bersifat permohonan, bukan paksaan, dan tidak bertujuan untuk melanggar prosedur penerimaan siswa baru yang berlaku.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa tindakan tersebut bisa menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Budi mengakui bahwa langkahnya tidak tepat, terutama saat momentum proses SPMB yang tengah berlangsung dan menjadi perhatian banyak pihak. Ia pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kegaduhan yang timbul.(wid,rls,ant/dya)

Angka Putus Sekolah SMA Lebih dari 20%



SEBANYAK lebih dari 20 persen anak sekolah jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami berhenti atau putus sekolah. Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

"Angka putus sekolah di jenjang SLTA itu masih sangat tinggi. Masih lebih dari 20 persen anak-anak usia sekolah yang jenjang SLTA itu berhenti sekolah," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Abdul Mu'ti lantas menjelaskan ada sejumlah faktor penyebab anak mengalami berhenti sekolah.

Pertama, karena alasan ekonomi. Kedua, karena tidak adanya sarana untuk belajar.

"Sebagian bukan karena alasan ekonomi, tetapi karena alasan yang berkaitan dengan ketersediaan, sarana, dan prasarana yang tidak memungkinkan mereka untuk belajar. Semangatnya ada, ekonominya ada. Tapi lembaganya tidak ada," ujar Abdul Mu'ti.

Penyebab ketiga, menurut Mendikdasmen, perkawinan anak. "Ada realitas di mana pernikahan dini di negara kita masih sangat tinggi," katanya.

Selain itu, Mu'ti mengatakan, pandangan masyarakat yang memordukakan pendidikan juga menjadi penyebabnya.

Dia mencontohkan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), banyak orang-orang yang memilih untuk bekerja dibandingkan menempuh pendidikan.

"Sumbawa itu banyak orang yang tidak sekolah, karena mereka sudah bisa bekerja, mendapatkan income yang lumayan tinggi tanpa harus sekolah," ujar Abdul Mu'ti.1

"Mereka bekerja di sektor-sektor non-formal di pertambangan.

Mereka bisa mendapatkan per hari itu antara Rp 300 ribu sampai Rp 350 ribu. Mereka pikir-nya tidak usah sekolah, sudah dapat pendapatan kayak gini. Ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri," katanya lagi.

Untuk itu, Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah berupaya mengentaskan angka anak putus sekolah lewat Gerakan 1.000 Anak Putus Sekolah SMK Berdaya Lewat Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW).

Program tersebut diharapkan mampu menurunkan angka anak putus sekolah dan mengoptimalkan bonus demografi demi mencapai target Indonesia Emas 2045.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin menyebut, berdasarkan data BPS, sebanyak 9.391 atau setara 0,19 persen siswa SMK putus sekolah.

Mengatasi tingginya anak putus sekolah (APS), Kemendikdasmen meluncurkan program gerakan 1.000 APS SMK berdaya lewat Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).(wid,ant/dya)

OJK RESMI TUNDA CO-PAYMENT ASURANSI KESEHATAN, NASABAH BATAL BAYAR 10%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunda penerapan kebijakan co-payment pada produk asuransi kesehatan, yang sebelumnya direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2026. Artinya, nasabah tak jadi bayar 10%.

Keputusan ini diambil mengikuti hasil Rapat Kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (30/6/2025), pasca diterbitkannya SEOJK terkait aturan tersebut.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa kebijakan co-payment sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 7/SEOJK.05/2025 telah menimbulkan banyak pertanyaan dan menimbulkan polemik di masyarakat.

"Dalam rangka penyusunan POJK sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 (dua), OJK menunda pelaksanaan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7, Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan sampai diberlakukannya POJK," ungkap Misbakhun, Senin (30/6/2025).

Ia juga menambahkan, Komisi XI DPR RI akan melakukan meaningful participation guna menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan aturan terkait produk asuransi kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan pihaknya memahami dan menerima kesimpulan rapat kerja bersama DPR.

"Kami dapat menyepakati dengan pemahaman tadi," ujar Mahendra di hadapan anggota dewan.

Senada dengan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan OJK akan mengikuti arahan dari Komisi XI DPR.

Namun, ia menegaskan bahwa regulasi co-payment tetap penting untuk menjaga keberlanjutan industri asuransi kesehatan.

"Klaim ratio itu sudah mendekati 100%, bahkan kalau dimasukkan dengan OPEX-nya itu sudah di atas lagi. Jadi tahun lalu rata-rata kenaikan premi asuransi kesehatan sudah mencapai lebih dari 40%. Jadi sebenarnya sudah cukup tinggi premi



Petugas keamanan berjalan di depan berbagai logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta. (dok)

yang dibayarkan. Jadi ini adalah salah satu langkah untuk memperbaiki ekosistem asuransi kesehatan. Jadi itu co-payment hanya salah satu," jelas Ogi saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI.

Ogi menilai, penerapan co-payment hanya salah satu langkah untuk membenahi ekosistem asuransi kesehatan yang semakin tertekan

akibat beban klaim yang tinggi.

Sebagai informasi, OJK menerbitkan SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025 pada 19 Mei 2025 yang mengatur ketentuan baru mengenai produk asuransi kesehatan. Aturan ini mewajibkan peserta menanggung sebagian biaya perawatan atau co-payment.

Dalam beleid tersebut, peserta

Klaim Melejit Sejak 2022, Tapi Premi Menurun

ASOSIASI Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat adanya tren peningkatan tajam dalam klaim asuransi kesehatan sejak 2022, melebihi pertumbuhan premi yang dibayarkan oleh nasabah. Data AAJI menunjukkan pada 2024, klaim mencapai Rp 24,18 triliun, sementara premi hanya Rp 19,84 triliun.

Kesenjangan ini menjadi sorotan utama dalam penyusunan kebijakan baru industri asuransi ke depan.

"Kalau kita lihat, 2020-2021 di mana klaim dan premi masih seimbang, sejak 2022 yang merah (diagram batang klaim) lebih tinggi. Klaim meningkat, tetapi preminya tidak naik sepadan. Akhirnya perusahaan asuransi menanggung defisit yang makin besar," ungkap Kepala Departemen Klaim dan Manfaat Asuransi AAJI dr. Dian Budiani.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar menyebut aset perusahaan asuransi di Indonesia saat ini baru mencapai 5,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN yakni 15 persen, di luar

Singapura yang sudah hampir 70 persen.

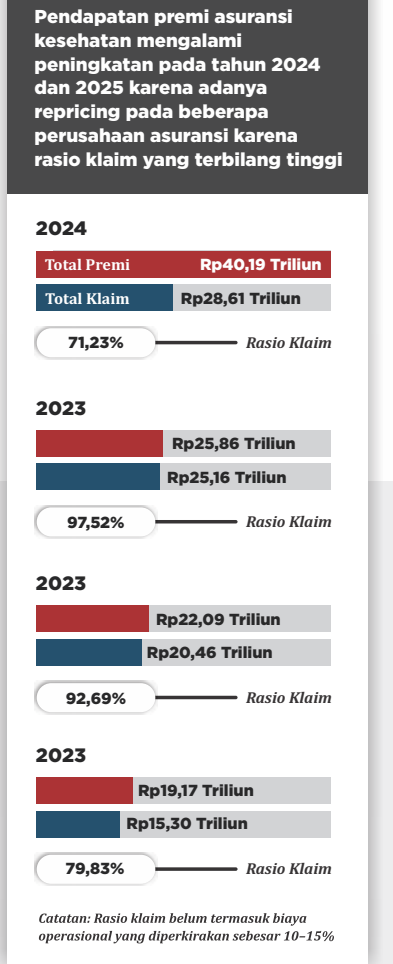
Begitu pula dengan total premi asuransi yang dibayarkan setiap tahunnya dibandingkan PDB atau terminologi penetrasi, dia mengungkapkan saat ini masih di bawah 3 persen dari PDB, jauh di bawah Singapura 10 persen dan rata-rata ASEAN 3-5 persen.

"Berkaitan dengan itu, tentu kami melihat bahwa kualitas dan cakupan perlindungan yang dapat diberikan dari risiko kesehatan yang merupakan bagian integral dari ketahanan ekonomi masyarakat juga bersifat terbatas," tegas Mahendra.

Lebih lanjut, Mahendra menuturkan, jarak proteksi (protection gap) di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia masih sangat besar, jumlahnya ditaksir mencapai USD 886 miliar pada tahun 2022. Hal ini, menurutnya, mencerminkan belum ratanya proteksi asuransi terhadap berbagai risiko kesehatan, sementara risiko seperti bencana alam dan penyakit kritis terus meningkat.

"Dalam kaitan dengan konteks Indonesia, kami akan menyampaikan beberapa hal yang menunjukkan bahwa banyak sekali hal-hal yang

asuransi diwajibkan menanggung paling sedikit 10% dari total biaya klaim. Batas maksimum yang dapat dibebankan kepada peserta ditetapkan sebesar Rp 300.000 per pengajuan klaim untuk rawat jalan, dan Rp 3 juta untuk rawat inap. (wid,rls,ant/dya)



belum terproteksi oleh asuransi, baik oleh Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan maupun oleh asuransi kesehatan yang non wajib," ungkap Mahendra.

Selain rendahnya cakupan proteksi asuransi, dia juga menambahkan alasan lain mendesakunya skema co-payment adalah inflasi sektor kesehatan atau inflasi medis di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dan mengkhawatirkan.

"Pada tahun 2023 terlihat bahwa tingkat inflasi kesehatan itu mencapai hampir tiga kali lipat dari tingkat inflasi secara umum, dan untuk tahun 2025 diperkirakan tingkat inflasi medis mencapai 13,6 persen," jelas Mahendra. (wid,rls,ist/dya)

Gaduh Usul DPRD Kabupaten Malang soal Penghentian Pasokan Air Dirut Perumda Tugu Tirta: Itu Perjanjian 'G to G'



(Ilustrasi) Filtrasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perumda Tugu Tirta Kota Malang. (dok. Ist)

MALANG - Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum (PDAM) Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, akhirnya menanggapi usulan penghentian pasokan air dari Kabupaten Malang ke Kota Malang. Ditegaskan bila itu merupakan perjanjian Government-to-government (G to G).

"Kalau kami menanggapi persoalan itu tidak ada habisnya. Masalah itu kan sudah selesai. Itu perjanjian G to G antara Pemkot Malang dan Pemkab Malang sebelum masa kepemimpinan saya," ujar Priyo saat dikonfirmasi Senin (30/6/2025).

Ditegaskannya, masa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kota dan Kabupaten Malang baru akan berakhir pada bulan Desember 2025 mendatang. Di dalam perjanjian tersebut, menurutnya, akan dicantumkan klausul mengenai evaluasi setelah masa kerja sama berakhir.

Terkait kemungkinan evaluasi harga beli

air dalam kerja sama, yang juga menjadi salah satu alasan pengusulan pemberhentian pasokan, Priyo menyampaikan banyak masyarakat belum memahami struktur biaya pengelolaan air bersih.

Menurutnya, harga beli dari Perumda Tirta Kanjuruhan tidak bisa dilihat secara sederhana. "Orang kan melihat harga terlalu rendah. Tapi orang tidak tahu bahwa di samping harga beli itu masih ada ongkos SDM, listrik, bahan kimia, perawatan, dan lain-lain. Hal ini seringkali tidak dipahami masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Priyo menyebutkan sudah ada pembicaraan antara Bupati Malang dan Wali Kota Malang terkait evaluasi harga beli air. Ia menyampaikan keyakinannya, hasil evaluasi nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak.

Sudah ada pembicaraan antara Bupati Malang dan Wali Kota Malang untuk menaikkan harga beli air. Tidak perlu khawatir akan hal ini, semuanya akan kami atur bagaimana baiknya bagi kedua belah pihak," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga memberikan tanggapan atas usulan penghentian pemanfaatan Sumber Pitu oleh PDAM Kota Malang. Wahyu menyatakan, perjanjian kerja sama antara kedua pemerintah daerah telah memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada saat di KPK beberapa tahun lalu, saya mewakili Kabupaten Malang saat itu, semuanya sudah clear dan tidak ada masalah. Jadi tidak ada alasan untuk mengajukan penghentian pengambilan air Sumber Pitu," terang Wahyu yang sebelumnya menjabat Sekda Kabupaten Malang.

Sebagai informasi, Perumda Tugu Tirta Kota Malang selama ini mendapatkan pasokan air bersih dari sejumlah sumber air di wilayah

Kabupaten Malang, seperti Sumber Pitu dan Sumber Wendit. Air tersebut kemudian didistribusikan kepada warga Kota Malang dengan tarif bervariasi, tergantung pada peruntukannya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrak, sebelumnya menyebut harga beli air dari Kabupaten Malang dinilai terlalu rendah. Menurutnya, air dari Sumber Wendit dijual ke Kota Malang seharga Rp 200 per meter kubik, sementara dari Sumber Pitu hanya Rp 150 per meter kubik.

Zulham membandingkan harga beli tersebut dengan tarif penjualan air ke masyarakat Kota Malang. Ia menyebut tarif air rumah tangga di Kota Malang mencapai Rp 3.400 per meter kubik, sementara untuk industri bisa mencapai Rp 14.300.

"Jadi wajar kalau kami minta kenaikan. Karena di Kota Malang, air ini dijual mahal ke warga hingga 17 kali lipat dari harga beli. Semisal itu dijual murah saya kira tidak masalah," ujarnya, Selasa (24/6/2025) lalu.

Selain itu, Zulham juga menyoroti nilai kompensasi dari Kota Malang untuk pemanfaatan air. Ia menyebut kompensasi untuk Sumber Wendit sebesar Rp 8 miliar per tahun dan untuk Sumber Pitu sebesar Rp 1,3 miliar per tahun. (Santi/Dya)

DPRD Kabupaten Malang Soroti Realisasi dan Pengelolaan PAD dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024

MALANG - DPRD Kabupaten Malang menyoroti realisasi dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada paripurna hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Rabu (26/6/2025).

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menyampaikan laporan ini merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pembahasannya, terdapat sejumlah evaluasi yang menjadi perhatian bersama, khususnya terkait dengan realisasi PAD.

"Penetapan target PAD seharusnya disesuaikan dengan data potensi yang akurat. Namun, hingga saat ini, DPRD belum menerima data tersebut secara menyeluruh," ujarnya.

Menurut Darmadi, peningkatan PAD menghadapi berbagai hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah.

Dirincinya, upaya intensifikasi dapat dilakukan melalui validasi data potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, pelaksanaan operasi mendadak (sidak), penegakan sanksi hukum, serta pengawasan dan pembinaan terhadap aparat pemungut pajak.

Selain itu, penagihan terhadap piutang pajak dan retribusi daerah juga diharapkan dapat dimaksimalkan. Pihaknya juga mendorong pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat.

Sedangkan dari sisi ekstensifikasi, peningkatan pendapatan pajak, menurutnya dapat diupayakan dengan mengembangkan jenis pungutan pajak baru. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

"PAD tidak hanya menjadi indikator besar kecilnya pendapatan daerah, tapi juga menunjukkan

kemandirian fiskal suatu daerah. Saat ini, pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi, yakni mencapai 79,88 persen," imbuh Darmadi.

Lebih lanjut, DPRD juga memberikan perhatian khusus terhadap realisasi retribusi daerah yang baru mencapai 62,62 persen dari target. Dinilainya, hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan data potensi, manajemen pemungutan yang belum maksimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

"Kami berharap, di tahun-tahun mendatang, temuan atas laporan keuangan bisa berkurang dan tidak terjadi pengulangan, serta Kabupaten Malang dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),"



Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Kabupaten Malang, Rabu (26/6/2025). (dok. Humas DPRD Kab Malang)

katanya.

Adapun realisasi pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024, tercatat sebesar Rp4,64 triliun dari target Rp4,77 triliun atau setara dengan 97,43 persen. (Santi/Dya)



Petugas penegak hukum dan petugas tanggap darurat di Cherry Hill Park dekat 15th Street pada Minggu (29/6/2025) sore, setelah ada laporan serangan penembakan di Gunung Canfield, Coeur d'Alene, Idaho. (Foto: AP)

2 DAMKAR AS TEWAS DISERGAP SAAT PADAMKAN API

Penyergapan bersenjata menimpa petugas pemadam kebakaran yang tengah menjalankan tugas di negara bagian Idaho, Amerika Serikat. Insiden tragis itu mengakibatkan dua personel damkar meninggal dunia

Insiden mematikan tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (30/6/2025), terjadi di Kootenai County, taman dan area pendakian populer di negara bagian Idaho, pada Minggu (29/6/2025) malam, tepatnya saat para petugas memadamkan sedang melaksanakan tugas mereka memadamkan kebakaran hutan di lereng gunung tersebut.

Tak lama setelah insiden itu, otoritas negara bagian Idaho menemukan seorang pria bersenjata dalam keadaan tidak bernyawa di area Gunung Canfield, yang berada di area yang sama dengan penyergapan terhadap petugas pemadam kebakaran setempat.

"Malam ini, para anggota tim SWAT menemukan seorang pria yang sudah meninggal di Gunung Canfield," demikian pernyataan kantor Sheriff Kootenai County.

"Sebuah senjata api ditemukan di dekatnya," imbuh pernyataan tersebut.

Disebutkan oleh kantor Sheriff Kootenai County bahwa perintah berunding-di-tempat yang sebelumnya diberlakukan "telah dicabut" usai temuan pria bersenjata yang tewas. Namun diperingatkan juga bahwa kebakaran hutan masih berkobar di area Gunung Canfield.

Penyergapan bersenjata itu sempat memicu operasi perburuan selama berjam-jam oleh otoritas kepolisian setempat.

Tidak diketahui secara jelas motif

penyergapan bersenjata terhadap para petugas pemadam kebakaran itu. Sheriff Robert Norris mengatakan bahwa penyergapan itu dilakukan dengan menggunakan senapan berdaya tembak tinggi.

Otoritas setempat meyakini dua orang yang tewas dalam penyergapan bersenjata itu adalah petugas pemadam kebakaran.

Gubernur Idaho, Brad Little, dalam

pernyataannya menggambarkan penyerangan itu sebagai "serangan langsung yang kejam terhadap para petugas pemadam kebakaran kita yang pemberani". Dia mengatakan dirinya "sedih" mendengar soal penyerangan mematikan tersebut.

Sementara itu, FBI menanggapi kejadian tersebut dengan tim teknis dan dukungan taktis, kata Wakil Direktur Dan Bongino.

Pimpinan Partai Republik DPR Idaho mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Kami merasa ngeri dengan pembunuhan dua petugas pemadam kebakaran di Coeur d'Alene, dan terkejut dengan serangan yang begitu kejam terhadap responden pertama kami. Kami berdoa untuk mereka, yang terluka, keluarga mereka, dan rekan-rekan mereka."

Situasi Berbaya, Kebakaran Tak Dipadamkan

KEBAKARAN semak yang melanda lereng timur Gunung Canfield, Idaho, pada Minggu (29/6/2025) masih belum dapat dipadamkan sepenuhnya. Pihak berwenang menyatakan kondisi di lokasi terlalu berbahaya bagi tim pemadam karena adanya ancaman tembakan dari pelaku bersenjata yang belum tertangkap.

Sheriff Kootenai County, Robert Norris, menegaskan bahwa kebakaran akan dibiarkan menyala sementara waktu demi menjaga keselamatan personel. "Kami tidak akan mengirimkan sumber daya apa pun ke sana sampai ancamannya benar-benar dinetralisir," tegas Wakil Kepala Pemadam Kebakaran Coeur d'Alene, Bill Deruyter, dalam konferensi pers Minggu malam.

Deruyter juga mengungkapkan bahwa risiko kebakaran saat ini berada pada level tinggi. "Suhu memang akan turun malam ini, tetapi diperkirakan kembali meningkat besok," katanya.

Gunung Canfield, kawasan alam seluas 24 hektare di sisi timur kota Coeur d'Alene, dikenal sebagai jalur pendakian dan bersepeda dengan vegetasi hutan lebat. Lokasi ini hanya berjarak sekitar 30 mil dari Spokane, Washington.

Menurut Sheriff Norris, laporan pertama kebakaran semak diterima pada pukul 13.21 waktu setempat. Namun, sekitar pukul 14.00, tim darurat mulai menerima laporan tembakan yang ditujukan kepada petugas. Saat itu, tiga unit dari Coeur d'Alene Fire Department dan Kootenai Fire Rescue telah berada di lokasi untuk menangani kebakaran awal.

Situasi di lapangan terus berkembang. Otoritas masih berupaya mengevakuasi korban serta mengamankan area pegunungan yang kemungkinan masih menjadi target pelaku. Kebakaran ini kemudian dinamai sebagai Kebakaran Nettleton Gulch, dan menurut Departemen Pertanian Idaho, api masih menyala hingga pukul 10 malam waktu setempat.

Sementara itu, Manajemen Darurat Daerah Kootenai memperingatkan warga sekitar untuk tetap siaga apabila api meluas. "Petugas pemadam kebakaran akan berada di sana sepanjang malam," ujar Norris.

Upaya pemadaman sempat dihentikan hingga pukul 19.30 karena kondisi tidak aman. Sejauh

Coeur d'Alene adalah kota berpenduduk 55.000 jiwa di dekat perbatasan Idaho dengan Washington.

Gunung Canfield adalah area pendakian dan bersepeda yang populer di pinggiran kota, ditutupi dengan pepohonan dan semak belukar yang lebat serta disilangkan dengan jalan setapak yang mengarah ke hutan nasional. (AFP, CNN, ist/nei)

KASUS PENEMBAKAN DI AS SEPANJANG 2025

- **29 Juni – Coeur d'Alene, Idaho:** Sniper menewaskan 2 petugas damkar dan melukai 2 lainnya saat kebakaran Gunung Canfield. Pelaku ditemukan tewas.
- **21 Juni – Moreno Valley, California:** Enam remaja (14–18 tahun) terluka tembak di area parkir; satu kritis.
- **28 Mei – Little River, South Carolina:** Penembakan di kapal pesta menewaskan 1 orang, 11 luka-luka.
- **24 Juni – Baltimore, Maryland:** Dua insiden terpisah melukai 8 orang, termasuk 2 remaja.
- **Akhir Mei – Philadelphia, Pennsylvania:** Penembakan di taman kota saat Memorial Day, 2 tewas, 9 luka-luka.
- **17 April – FSU, Tallahassee:** Penembakan di Student Union menewaskan 2 orang, 6 luka. Pelaku, mahasiswa, ditangkap.
- **8 April – Spotsylvania, Virginia:** Transaksi senjata ilegal berujung penembakan, 3 tewas, 3 luka.
- **22 Februari – Shiloh, Pennsylvania:** Penembakan di ICU UPMC Memorial, 1 polisi tewas, 5 luka, pelaku ditembak mati.

ini, api telah menghancurkan sekitar 20 hektare lahan, namun belum ada laporan bangunan yang rusak.

Sebagai langkah pengamanan tambahan, wilayah sekitar Gunung Canfield ditetapkan sebagai zona larangan terbang, termasuk pelarangan penggunaan drone, hingga pemberitahuan lebih lanjut. (cnn, ist/nei)



Musik Penting untuk Anak, Ini Manfaatnya!

Bagi anak-anak, musik bukan hanya sekadar bentuk hiburan semata. Lebih dari itu, musik berperan penting sebagai sarana yang mendukung proses tumbuh kembang mereka. Melalui musik, emosi anak dapat terstimulasi dengan baik, yang pada akhirnya membantu mereka belajar berbagai hal, termasuk menumbuhkan rasa empati terhadap sesama.

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang Pediatrik Sosial IDAI, DR. Dr. Lisa Pangemanan, Sp.A, Subsp.T.K.P.S(K) menyebut, secara alamiah telinga manusia memiliki respons yang berbeda saat mendengarkan suara dan musik. Suara akan diterima oleh telinga, kemudian diubah menjadi gelombang listrik. Gelombang listrik ini lalu akan diteruskan ke otak. Ketika sampai ke otak, gelombang ini akan mengaktivasi area yang berbeda pada otak.

Menurut dr. Lisa, apabila orang tua ingin mengenalkan atau memberikan pelatihan musik ke anak, maka sebaiknya pahami tentang building blocks atau hambatannya. Memberikan pelatihan musik ke anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, usia, bagaimana pelatihan diberikan, motivasi sang anak, bagaimana kepribadian, hingga bagaimana orang tua serta gurunya memberi pengajaran. Semua hal itu, dapat berpengaruh terhadap kemampuan mendengarkan, kemampuan memainkan alat musik dan tingkat

fokus pada anak.

"Sehingga pada akhirnya yang kita dapatkan, yang kita inginkan adalah adanya verbal memori, social skills, general IQ eksekutif function listening skills and reading, karena kalau kita bicara notasi maka ada yang kemampuan untuk membaca di situ," tutur dr. Lisa.

Tingkatkan Memori Kerja Anak

Untuk dapat bermain musik dengan baik, anak memerlukan memori kerja yang kuat. Hal ini penting karena dalam proses bermusik, anak harus mampu mengenali berbagai jenis suara serta memahami struktur dan ritme musik yang mereka dengar. Selain mengenali suara, anak juga perlu bisa membedakan komponen-komponen suara seperti nada, tempo, dan harmoni. Kemampuan ini tidak lepas dari peran ingatan yang baik, karena mereka harus menyimpan dan mengolah informasi tersebut secara cepat saat bermain alat musik atau bernyanyi.

Stimulasi Emosi

Pernah melihat anak-anak bernyanyi bersama dan saling tertawa? Nah manfaat musik untuk anak berikutnya adalah membantu mereka belajar bekerja sama, berbagi, dan memahami emosi orang lain. Melalui lagu-lagu, anak-anak bisa lebih mudah mengenali ekspresi perasaan dan meningkatkan empati terhadap orang di sekitarnya.

Lebih dari itu, musik dan emosi anak saling berkaitan erat. Musik dapat menjadi alat untuk membantu mereka mengelola perasaan, baik saat senang, sedih, atau bahkan marah. Lagu-lagu dengan irama tenang bisa membantu si kecil merasa lebih rileks, sementara lagu-lagu ceria bisa meningkatkan semangatnya.

Meningkatkan Komunikasi Koordinasi

Bermain alat musik merupakan sesuatu yang kompleks dan sulit. Anak yang sudah melalui proses belajar dari belum bisa hingga mahir bermain musik, cenderung berempati ketika melihat orang lain mengalami kesulitan bermain musik. Sebab, anak tersebut bisa mengerti kesulitan orang lain.

"Sehingga walaupun ada misalnya, penampilan yang kurang atau segala macam, anak tidak langsung berikan kritik yang bagaimana gitu ya. Seperti kalau kita melihat konser musik yang dikerjakan oleh anak-anak, mereka tidak semuanya memberikan suatu penampilan yang sempurna. Tapi kita belajar untuk mengapresiasi itu dan antar mereka sendiri, mereka belajar berempati karena mereka paham betapa sulitnya untuk menguasai kemampuan tersebut," pungkas dr. Lisa.

Membantu Perkembangan Motorik

Si kecil sering tepuk tangan atau menghentakkan kaki saat mendengar

musik? Itu bukan sekadar kesenangan, musik membantu meningkatkan keterampilan motorik kasar dan halus anak. Ketika mereka menari atau bermain alat musik, koordinasi tangan dan mata mereka ikut terlatih.

Bahkan, musik sebagai alat edukasi anak sangat direkomendasikan dalam terapi motorik bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan. Aktivitas seperti menabuh drum, menggoyangkan marakas, atau menekan tuts piano dapat memperkuat otot-otot kecil mereka dengan cara yang menyenangkan.

Mengurangi Stres dan Meningkatkan Mood

Si kecil rewel atau sulit tidur? Musik bisa jadi solusinya! Penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan musik yang lembut dapat menurunkan kadar stres pada anak dan membantu mereka merasa lebih tenang.

Selain itu, musik yang ceria juga bisa meningkatkan mood dan membuat anak lebih bersemangat menjalani hari. Itulah mengapa banyak taman kanak-kanak menggunakan lagu-lagu interaktif dalam proses belajar, karena dapat membantu anak tetap termotivasi dan menikmati aktivitas mereka. (nei,iat/dya)

Google Rilis Doppl, Aplikasi Coba Baju Pakai AI

Google telah meresmikan peluncuran aplikasi eksperimental terbarunya yang diberi nama Doppl. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memvisualisasikan bagaimana pakaian akan terlihat ketika dikenakan oleh pengguna.

Aplikasi ini saat ini tersedia di perangkat iOS dan Android, namun, hanya untuk pengguna di Amerika Serikat, dikutip dari Tech Crunch, Senin (30/6/2025).

“Sebagai eksperimen dari Google Labs, Doppl masih dalam tahap awal dan mungkin tidak selalu akurat. Tampilan, ukuran, dan detail pakaian bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Google.

Doppl dirancang untuk memberikan pengalaman mencoba pakaian secara virtual dengan cara yang lebih personal dan realistis. Aplikasi ini memungkinkan pengguna

melihat tampilan berbagai pakaian langsung pada versi digital dari tubuh mereka sendiri, sehingga memudahkan dalam memilih busana yang sesuai tanpa harus mencobanya secara fisik.

Untuk dapat menggunakan fitur ini, pengguna perlu mengunggah foto tubuh secara penuh terlebih dahulu. Foto tersebut kemudian digunakan untuk membuat model tubuh digital yang akurat, sehingga simulasi pakaian terlihat lebih natural dan sesuai dengan bentuk tubuh asli pengguna.

Setelah itu, pengguna bisa mengunggah foto atau tangkapan layar pakaian untuk melihat bagaimana pakaian tersebut akan terlihat saat dikenakan.

Setelah memilih pakaian yang ingin dicoba, Doppl akan menghasilkan gambar virtual dari pengguna yang sedang mengenakan

pakaian tersebut.

Tidak hanya gambar diam, Doppl juga dapat mengubah hasil visualisasi menjadi video AI untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai tampilan pakaian dalam situasi bergerak.

Aplikasi ini tidak hanya memungkinkan pengguna mencoba pakaian secara virtual, tetapi juga menawarkan berbagai fitur tambahan yang memudahkan pengalaman pengguna. Salah satunya adalah kemampuan untuk menyimpan tampilan favorit, sehingga pengguna dapat dengan mudah kembali melihat outfit yang paling disukai.

Selain itu, pengguna juga dapat mengakses riwayat percobaan pakaian virtual yang pernah dilakukan. Fitur ini sangat berguna untuk membandingkan berbagai gaya atau model pakaian. Tak hanya itu, hasil tampilan yang telah dibuat juga bisa

dibagikan kepada orang lain, seperti teman atau keluarga, untuk mendapatkan masukan sebelum membuat keputusan belanja.

Google menyatakan bahwa Doppl merupakan pengembangan dari fitur Google Shopping, yang sebelumnya telah meluncurkan teknologi coba pakaian virtual.

Namun, berbeda dari fitur sebelumnya yang menampilkan pakaian pada berbagai tipe tubuh model, Doppl kini memungkinkan pengguna mencoba pakaian pada tubuh digital mereka sendiri, memberikan pengalaman yang lebih personal dan interaktif.

Meskipun teknologi ini menjanjikan pengalaman fashion virtual yang lebih realistis, Google juga menyatakan bahwa Doppl adalah peluncuran eksperimental. Hingga kini, belum ada informasi kapan atau apakah aplikasi ini akan dirilis secara global. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Rambut Bercabang?

Coba Bahan Rumahan Ini

Setiap perempuan tentu mendambakan rambut yang indah, lembut, dan sehat. Namun, tidak sedikit dari mereka yang masih menghadapi tantangan merawat rambut yang bercabang dan terasa kasar. Rambut bercabang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, namun yang paling umum adalah penggunaan alat penata rambut bersuhu tinggi yang membuat rambut menjadi kering. Di samping itu, terlalu sering mewarnai rambut juga dapat memicu munculnya masalah ini.

Untungnya, rambut bercabang bukanlah masalah besar yang sulit untuk diatasi. Ada berbagai cara alami untuk mengatasinya dalam pembahasan berikut ini. Untuk mengatasi rambut bercabang, kamu bisa menggunakan cara alami seperti berikut ini:

Minyak Kelapa

Minyak kelapa terbukti mampu mempertahankan protein pada rambut, sehingga menjadikannya lebih kuat dan sehat. Selain itu, bahan alami ini bisa memperbaiki ujung rambut bercabang, serta melembapkan setiap helaian rambutmu.

Untuk hasil yang optimal, gunakan satu sendok minyak kelapa dan aplikasikan mulai dari ujung rambut hingga bagian tengah batangnya. Hindari mengoleskannya ke kulit kepala agar tidak membuat rambut lepek. Kemudian, bungkus rambut dengan handuk atau plastik dan tunggu selama 30 menit sebelum membilasnya. Lakukan secara rutin agar hasilnya lebih cepat terasa.

Minyak Almond

Minyak almond juga bisa mengatasi rambut bercabang. Sebab, kaya akan nutrisi penting untuk rambut, seperti vitamin D, E, dan

berbagai mineral. Nutrisi itu tidak hanya melembapkan, tapi juga melindungi rambut dari kerusakan akibat radiasi UV. Penggunaannya cukup di ujung rambut yang kering saja. Lalu diamkan selama kurang lebih 30 menit sebelum dibilas hingga bersih.

Alpukat

Alpukat juga termasuk bahan alami yang efektif menutrisi rambut bercabang. Untuk mendapatkan manfaatnya, campurkan satu buah alpukat, satu butir telur, dan beberapa tetes minyak zaitun. Ketiga bahan alami itu mengandung asam lemak serta vitamin E dan K yang dapat melembutkan, melembapkan, melindungi rambut beserta folikelnya. Jadi, rambut bercabangmu tidak hanya akan halus, tapi juga lebih kuat.

Penggunaannya cukup simpel, kamu tinggal oleskan campuran bahan itu ke seluruh rambut, terutama pada bagian ujungnya. Biarkan selama 10-20 menit, lalu bilas dengan air hangat.

Madu dan Minyak Zaitun

Kombinasi madu dan minyak zaitun dapat melembapkan dan menutrisi rambut yang rusak. Madu menawarkan sifat emolien yang ideal untuk rambut bercabang.

Sedangkan minyak zaitun efektif merawat kulit kepala kering dan meningkatkan kilau rambut.

Campurkan tiga sendok makan minyak zaitun dengan dua sendok makan

madu. Kemudian, oleskan ke rambut yang bersih. Biarkan selama 20-30 menit, lalu bilas dengan shampoo untuk menghilangkan residunya.

Selain itu mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, jadi berikut cara mencegah rambut bercabang berikut ini:

Hindari Keramas Setiap Hari

Terlalu sering keramas ternyata bisa berdampak kurang baik untuk rambut. Saat kamu mencuci rambut, minyak alami yang diproduksi oleh kulit kepala ikut terangkat. Padahal, minyak ini penting untuk menjaga kelembapan alami rambut agar tidak kering dan bercabang. Kalau terlalu sering hilang, rambut bisa jadi kasar dan mudah rusak. Karena itu, kamu nggak perlu keramas setiap hari. Cukup 2-3 kali dalam seminggu agar rambut tetap sehat tanpa kehilangan kelembapan alaminya.

Sisir Rambut dengan Benar

Saat menyisir rambut, sebaiknya tidak langsung mulai dari akar. Hal ini justru bisa membuat rambut mudah kusut dan patah, apalagi jika kondisi rambut sedang kering atau bercabang. Menarik rambut dari akar saat masih kusut juga bisa menyebabkan kerontokan.

Langkah yang tepat adalah mulai menyisir dari ujung rambut terlebih dahulu. Setelah bagian bawah rapi, lanjutkan perlahan ke bagian tengah, lalu ke akar. Cara ini membantu mengurangi kusut secara bertahap dan mengurangi risiko kerusakan

rambut. Selain itu, gunakan sisir bergigi jarang untuk meminimalkan tarikan yang terlalu kuat.

Jangan Gunakan Shampoo di Ujung Rambut

Saat keramas, sebaiknya aplikasikan sampo hanya di kulit kepala, bukan di seluruh batang rambut. Hal ini karena kotoran dan minyak paling banyak menumpuk di area kulit kepala, sehingga bagian inilah yang perlu dibersihkan secara menyeluruh.

Setelah itu, pijat kulit kepala secara perlahan dengan ujung jari, bukan dengan kuku. Pijatan lembut ini membantu melancarkan peredaran darah, mengangkat kotoran, dan memberikan rasa rileks. Busa dari sampo yang mengalir saat dibilas sudah cukup untuk membersihkan bagian batang rambut tanpa membuatnya kering.

Pakai Conditioner

Saat menggunakan conditioner, aplikasikan produk mulai dari ujung rambut terlebih dahulu. Ujung rambut cenderung lebih kering dan rentan mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan kelembapan ekstra. Conditioner akan membantu melembutkan, melembapkan, dan mengurangi risiko rambut bercabang.

Hindari mengoleskan conditioner langsung ke kulit kepala, karena dapat membuat rambut terasa lepek dan berminyak. Selain itu, penggunaan di kulit kepala juga bisa menyumbat pori-pori dan menyebabkan ketombe pada beberapa orang. Fokuskan pada bagian tengah hingga ujung rambut untuk hasil yang lebih optimal.

Potong Ujung Rambut Secara Teratur

Memotong ujung rambut secara teratur adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan rambut. Ujung rambut yang dibiarkan terlalu lama tanpa dipotong bisa menjadi kering, bercabang, dan rapuh, yang pada akhirnya membuat rambut terlihat kusam dan tidak terawat. Dengan rutin memotong bagian ujung, rambut akan tampak lebih segar, sehat, dan mudah diatur.

Disarankan untuk memangkas ujung rambut setidaknya setiap 6-8 minggu sekali. Meskipun hanya memotong sedikit, kebiasaan ini dapat mencegah kerusakan lebih lanjut dan membantu pertumbuhan rambut yang lebih kuat. (nei,ist/dya)



Membuncit, Anggaran (dari Hal 1) ...

Subsidi listrik yang diberikan pemerintah kerap lagi dinantikan masyarakat khususnya masyarakat bawah. Sebab, adanya subsidi listrik tentunya sangat membantu dan meringankan beban biaya hidup mereka. Misalnya pada rakyat miskin dan rentan yang listrik mereka 450 VA dan 900 VA, dengan adanya subsidi maka pendapatan mereka bisa digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya.

Adanya subsidi listrik juga bisa mendorong produktivitas ekonomi kecil, mulai dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), petani, nelayan, dan usaha rumahan. Sebab dengan mendapatkan subsidi listrik maka ongkos produksi lebih rendah, dan dampak lebih besarnya adalah meningkatkan daya saing. Dari sinilah, subsidi listrik ikut mengendalikan inflasi dan menghindari gejolak sosial.

Tak hanya itu, adanya subsidi listrik juga memungkinkan pemerintah memperluas jaringan listrik ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), di mana biaya penyediaan listrik biasanya lebih tinggi dari tarif jual.

Akan tetapi di satu sisi, subsidi listrik dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan dan membutuhkan biaya besar dari APBN, yang dapat membebani keuangan negara dan mengurangi ruang fiskal untuk sektor lain.

Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah subsidi listrik terus mengalami kenaikan. Di tahun 2020 subsidi listrik mencapai Rp 48 triliun, kemudian pada tahun 2021 naik lagi menjadi Rp 50 triliun. Kemudian pada 2022 menjadi Rp 59 triliun, pada 2023 mencapai Rp 68 triliun lebih, sedangkan pada 2024 mencapai Rp 77 triliun.

Akan tetapi, Kementerian ESDM mengungkapkan anggaran subsidi listrik akan membuncit di tahun 2025 ini. Pada tahun ini, anggaran subsidi listrik mencapai Rp 87,72 triliun, namun bisa melonjak hingga sebesar Rp 90,32 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025), menjelaskan kenaikan nilai subsidi ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu harga acuan minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), kurs rupiah dan inflasi.

Dia menjelaskan kemungkinan lonjakan subsidi listrik tersebut berdasarkan hitungan untuk outlook 2025. Hal ini dipicu oleh parameter yang tidak bisa dikendalikan yaitu tiga

faktor tadi. Bahkan, dia menyebutkan bahwa kurs adalah faktor yang sangat menentukan karena selalu naik terus yang mengakibatkan kenaikan di sampingnya.

"Ada juga volume penjualan ya. Dari 2020 itu sekitar 55 Tera Watt hour (TWh) naik hampir 12 TWh. Naik lagi di 2024 71 sekitar 16 TWh cukup besar. Target kita 2025 73 TWh. Dan sudah menyerap di Mei 2025 itu sekitar 31 TWh. Target outlooknya prognosisnya 76,63 TWh. Jadi ada penambahan penjualan mungkin lebih baik ekonominya barangkali. Sehingga penggunaan listriknya juga bertambah," katanya.

Jisman menuturkan, subsidi listrik ini diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan, mulai dari listrik rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Selain itu, ada juga dari listrik dari UMKM dan industri kecil menengah.

Dia melanjutkan, untuk golongan 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu masing-masing mencapai 24,75 juta pelanggan dan 85,40 juta pelanggan. "Sebagai contoh Bapak-Ibu sekalian untuk bisnis kecil itu seperti percetakan, gudang swasta. Kemudian industri kecil itu ada pabrik garam, pabrik kopi. Lalu kantor pemerintah itu ada kantor kepala desa. Ini yang menerima subsidi. Lalu sosial ada rumah sakit, ada masjid, ada panti asuhan," imbuh dia.

Jisman mengatakan, untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya beli masyarakat, dan daya saing industri, maka pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami perubahan atau tetap.

"Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta daya saing industri, Triwulan III 2025 diputuskan tarif tetap, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah," ujar Jisman.

Lebih lanjut Jisman menambahkan, bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi PT PLN (Persero) juga tidak mengalami perubahan. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat terjaga," jelas Jisman.

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7

Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan, mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Parameter ekonomi makro untuk Triwulan III 2025 mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2025. Secara akumulatif, perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif, namun Pemerintah memutuskan untuk tidak ada kenaikan tarif listrik.

"Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat terjaga," kata Jisman.

Parameter ekonomi makro untuk Triwulan III 2025 mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2025. Secara akumulatif, perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif, namun Pemerintah memutuskan untuk tidak ada kenaikan tarif listrik.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan. "Penetapan stabilitas tarif listrik ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. PLN siap mendukung penuh dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan," ujar Darmawan.

Selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, kata Darmawan, di saat yang bersamaan PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional untuk mendukung kelancaran proses bisnis dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif.

Sebelumnya, pemerintah juga memberikan diskon listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan kapasitas 2.200 VA ke bawah pada Januari dan Februari 2025 kemarin. Kemudian juga sempat merencanakan kembali memberikan diskon serupa pada pelanggan 1.300 VA ke bawah namun dibatalkan atau tidak jadi diberikan.

Sebagai ganti batalnya program diskon listrik, Pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran ke dalam skema Bantuan Subsidi Upah (BSU). BSU ini akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta dan 288.000 guru honorer dengan total anggaran Rp 10,72 triliun.

Adapun penerima BSU masing-masing akan mendapat bantuan sebesar Rp300.000 per bulan pada

Juni dan Juli 2025 atau dengan total Rp600.000. Meski begitu, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk masyarakat mendapatkan bantuan ini, termasuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam, mengatakan kebijakan ini belum tentu efisien mengingat banyak pekerja dengan penghasilan kecil yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan karena beberapa alasan.

"Pekerja di perusahaan kecil banyak yang tidak didaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Belum tentu mereka juga memiliki slip gaji yang bisa membuktikan penghasilan mereka kurang dari Rp 3,5 juta. Untuk mendapat bantuan saja, birokrasi bikin sulit rakyat," ucapnya.

Oleh karena itu, Mufti lebih sepakat jika bantuan bagi masyarakat diberikan melalui potongan tarif listrik. Sebab cakupannya akan jauh lebih luas dalam membantu masyarakat dan minim sistem birokrasi.

"Diskon tarif listrik sejatinya menasar langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah yang saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi," terang Mufti.

Ketika kebijakan ini dibatalkan dan dialihkan menjadi subsidi upah, kata Mufti, muncul kekhawatiran bahwa sebagian besar masyarakat yang justru membutuhkan tidak akan mendapatkan manfaat sepadan.

"Karena banyak warga yang bekerja di sektor informal, buruh harian, atau tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga tidak secara otomatis masuk dalam cakupan penerima subsidi upah. Sementara kalau diskon tarif listrik, mereka akan ikut menerima manfaat program bantuan," tutupnya.

Kenaikan subsidi listrik ini juga kemungkinan akan melonjak pada 2026 nanti. Pasalnya, Kementerian ESDM mengusulkan alokasi subsidi listrik antara Rp97,37 triliun hingga Rp104,97 triliun pada 2026 yang akan disalurkan kepada 44,88 juta pelanggan.

Jisman mengatakan subsidi listrik itu diprioritaskan bagi rumah tangga miskin dan rentan. "Ini untuk mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fisik, dan lingkungan," katanya.

Jisman mengatakan ada beberapa parameter makroekonomi yang menjadi dasar perhitungan subsidi ini, di antaranya nilai tukar rupiah yang diasumsikan berada di angka Rp16.500 sampai dengan Rp16.900, harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara 60 dolar AS hingga 80 dolar AS per barel, dan inflasi sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen. ant/kom/ist/lut)

INVESTOR BAKAL MAKIN MUDAH MASUK

Para investor akan semakin mudah untuk masuk ke negeri ini. Pemerintah telah menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia. Kemudahan tersebut seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Hal ini pun menjadi bagian dari paket deregulasi yang didorong oleh Presiden Prabowo dalam rangka memperkuat daya saing Indonesia.

Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025 ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk terus membangun ekosistem perizinan berusaha guna menunjang pertumbuhan investasi. Melalui penguatan pengaturan dan sistem yang terintegrasi, PP ini diharapkan mampu menyederhanakan proses, mempercepat layanan, serta memberikan kejelasan dan kepastian bagi seluruh pelaku usaha," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Moegiarso saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2025 yang diselenggarakan secara hybrid di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (30/06/2025).

Dia menandakan bahwa ada tiga poin kunci yang menjadi terobosan penting dalam PP 28 Tahun 2025. Pertama, kepastian Service Level Agreement (SLA) dalam proses penerbitan perizinan berusaha. Hal ini menjelaskan adanya pemberian tenggat waktu di setiap tahapan penerbitan perizinan berusaha yakni sejak proses pendaftaran, penilaian kebenaran dokumen, hingga verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha.

Poin kedua yaitu penerapan kebijakan fiktif-positif yang diimplementasikan secara bertahap dalam proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko. Jika respons yang disampaikan melewati tenggat waktu layanan (SLA), secara otomatis sistem akan melanjutkan proses ke tahapan berikutnya.

Kemudian, Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada

pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui penyederhanaan proses berbasis pernyataan mandiri di Online Single Submission (OSS). Dalam pemberlakuan regulasi tersebut, sistem OSS yang disempurnakan dengan menambah 3 subsistem baru yakni subsistem Persyaratan Dasar, subsistem Fasilitas Berusaha, dan subsistem Kemitraan.

"Selain ketiga hal pokok tersebut, kami juga ingin menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 ini menjadi acuan tunggal (single reference) yang artinya secara sangat tegas tidak boleh ada persyaratan atau izin tambahan yang diterbitkan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun pengelola kawasan yang tidak diatur dalam PP ini," tegas Sesmenko Susi Wijono.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menerangkan bahwa pokok pengaturan pertama dalam PP 28/2025 adalah masing-masing penerbitan perizinan berusaha memiliki jangka waktu yang pasti. Seperti penerbitan persyaratan dasar, perizinan berusaha (PB), maupun perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PBUMKU).

Untuk proses penerbitan persyaratan dasar, PB, maupun PB UMKU harus sesuai dengan jangka waktu layanan atau service level agreement (SLA) yang telah ditetapkan.

"Kita sudah menerapkan dan sudah mulai ada juga beberapa, ada empat paling tidak perizinan perusahaan yang terbit secara otomatis, artinya tidak diverifikasi oleh Kementerian Lembaga," ujar Riyatno.

Riyatno menjelaskan bahwa sistem verifikasi akan dilakukan secara otomatis untuk permohonan perizinan perusahaan. Dengan demikian, para investor baik dari dalam maupun luar negeri mendapat kepastian secara cepat.

"Misalnya dalam waktu 10 hari mengajukan permohonan perizinan perusahaan, dan misalnya SLA-nya 10 hari tidak terbit, maka sistem akan menerbitkan. Kalau risiko tinggi menengah tinggi akan dilakukan verifikasi. Sementara untuk risiko rendah menengah rendah itu terbit sendiri, artinya tanpa verifikasi oleh aparat pusat pemerintah," ujarnya menjelaskan.

Nantinya, akan ada sekitar 61 peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga dari berbagai kementerian sebagai turunan dari PP



Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

28/2025. Kemudian, Tenggat waktu penyelesaian seluruh regulasi pendukung ini adalah 4 bulan dari penerbitan, yakni 5 Oktober 2025. Kendati demikian, Riyatno memastikan pihaknya akan menyelesaikan pada Juli 2025 mendatang.

"Mungkin targetnya bisa sebulan ini harus selesai. Karena Oktober itu kan sistem operasional, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PP 28 ya, peraturannya lebih duluan. Targetnya insya Allah di bulan Juli ini," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam aturan ini pemerintah memastikan bahwa PB UMKU diajukan oleh pelaku usaha pada tahap operasional dan atau komersial yang berada pada tahap menjalankan kegiatan usaha, yakni tahapan setelah memulai kegiatan usaha.

Pemerintah juga mengurangi jumlah PB UMKU dengan mengklasifikasi PB UMKU menjadi empat kelompok, yaitu peredaran produk, pelayanan operasi, standarisasi produk atau jasa, dan kelancaran kegiatan usaha.

Seluruh perizinan berusaha yang bersifat operasional namun tidak termasuk ke dalam empat kelompok ini tidak dimasukkan sebagai kategori PB UMKU. Hal ini kata dia berdampak signifikan dalam mengurangi jumlah PB UMKU, dari sekitar 1.000 lebih menjadi hanya sekitar 350 an.

Terakhir, atau yang keempat, terkait dengan penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan ini mengusung konsep integrated inspection and report yang tujuannya untuk menyederhanakan pelaksanaan pengawasan dan menguatkan substansi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan sesuai standar yang ditetapkan.

Pengawasan pun akan dilakukan secara terintegrasi, menggunakan sub sistem pengawasan OSS RBA, dan terkoordinasi atau pelaku usaha tidak didatangi pengawasan berkali-kali dari berbagai instansi.

Sebelumnya, untuk mempermudah masuknya investasi, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu,

memperkenalkan Fiktif Positif (FikPos) yang mulai diimplementasikan pada sistem perizinan berusaha Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko sejak awal Juni lalu.

Fiktif Positif adalah prinsip dalam sistem perizinan berusaha yang menyatakan bahwa jika suatu permohonan perizinan yang telah memenuhi semua persyaratan tidak mendapatkan tanggapan atau keputusan dari pihak berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai Service Level Agreement (SLA), maka permohonan tersebut secara otomatis dianggap disetujui dan berlaku secara hukum. Fiktif positif diberlakukan sebagai terobosan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan perizinan.

"Kami ini memang mengelola OSS tetapi terkadang persyaratan-persyaratannya ini (menghambat), seperti PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), izin lokasi, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Persyaratan dasar dibuat post-audit, nanti sambil berjalan" ungkap Todotua Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025) lalu.

Todotua juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dan aparaturnya dalam mendorong investasi untuk meningkatkan perekonomian. Kegiatan retreat menjadi momentum penting untuk berinteraksi langsung dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengembangan investasi.

Menurutnya, Pemda memegang peran kunci dalam mendukung pertumbuhan investasi, terutama melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) yang bertugas menangani investasi.

"Forum ini merupakan forum yang secara pribadi kami nanti-nantikan karena ini momentum kita bisa bertatap muka secara langsung. Karena kementerian kami ini salah satu kementerian yang akan banyak berinteraksi dengan fungsi-fungsi Bapak/Ibu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota," ujar Todotua.. (rls/ant/ist/lut)